



Pengembangan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menuju Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau

Dokumen ini adalah bagian dari penelitian “Perluasan Pendekatan Yurisdiksi pada Sektor Kelapa Sawit di Indonesia” yang dilaksanakan CIFOR-ICRAF dan PPIIG Universitas Palangka Raya di Kabupaten Pulang Pisau dengan dukungan dari Walmart Foundation.

Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan komoditas utama Indonesia dalam perdagangan internasional maupun perindustrian. Kelapa sawit memberi kontribusi yang signifikan dan petani kelapa sawit memiliki peranan penting di dalamnya. Namun, pengembangan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada laju deforestasi dan juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatkan emisi gas rumah kaca, degradasi lahan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak lainnya.

Kelapa sawit juga memiliki relevansi dan implikasi besar bagi perempuan, yang berperan penting dalam proses budi daya dan pascapanen. Namun, terdapat sejumlah tantangan gender di sektor ini, salah satunya adalah kurangnya keterwakilan perempuan dalam organisasi kelompok tani kelapa sawit. Dorongan dan upaya telah dilakukan untuk mewujudkan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan dan

inklusif, misalnya melalui sertifikasi maupun formulasi Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB dan RAD KSB).

Kuatnya keterkaitan lintas sektoral kelapa sawit mendorong pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi antarsektoral untuk mengembangkan visi bersama guna mencapai keberlanjutan. Hal-hal ini dimungkinkan dan didorong melalui pendekatan yurisdiksi (*jurisdictional approach/JA*) yang semakin dipandang sebagai jalan untuk mewujudkan transisi keberlanjutan. Salah satu contoh dari JA di sektor kelapa sawit di Kabupaten Pulang Pisau ditunjukkan melalui proses multipihak dalam pengembangan RAD PKSB.

Dokumen kontribusi ini merupakan bagian dari kegiatan riset yang memfasilitasi pengembangan visi bersama guna memperkuat inisiatif kelapa sawit berkelanjutan pada level yurisdiksi, terutama di Kabupaten Pulang Pisau.

Dokumen kontribusi ini berisi hasil analisis perdagangan, rantai pasok dan nilai, risiko, deforestasi dan gender yang dilengkapi dengan penggunaan kerangka teori perubahan, teori tindakan, serta kerangka pemantauan dan evaluasi. Kami juga menyajikan pemodelan beragam skenario kebijakan terkait kelapa sawit berkelanjutan melalui JAPOS (*Jurisdictional Approach of Palm Oil Simulation*).

Dinamika Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan serta Perkembangan Kelapa Sawit

Kabupaten Pulang Pisau memiliki tutupan hutan alam dan hutan gambut sebesar 50% pada tahun 2000. Dalam kurun waktu 19 tahun, hutan alam maupun hutan gambut mengalami penurunan dan menyisakan 36% di tahun 2019. Luasan hutan alam yang terdiri atas hutan dan mangrove yang signifikan; dikonversi menjadi lahan pertanian, semak belukar, dan kebun kelapa sawit. Hutan alam dikonversi terlebih dahulu menjadi semak belukar sebelum akhirnya dikembangkan menjadi kebun kelapa sawit. Tren yang sama juga terjadi pada hutan gambut. Hasil analisis spasial multitemporal juga menunjukkan bahwa sebagian besar hilangnya tutupan lahan dan hutan di Kabupaten Pulang Pisau berkaitan dengan ekspansi kebun kelapa sawit. Pengembangan perkebunan kelapa sawit ini terjadi di bagian selatan kabupaten.

Produksi Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama Kabupaten Pulang Pisau selain karet. Total kebun kelapa sawit terdaftar di Kabupaten Pulang Pisau seluas 46.064 ha yang hampir seluruhnya (93,4%) dikuasai oleh perusahaan. Total produksi CPO (*crude palm oil*) baik dari perusahaan maupun pekebun rakyat mencapai 124.064 ton di tahun 2017 dan kebun kelapa sawit perusahaan memiliki produktivitas tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan kebun rakyat, yakni 4,99 ton CPO/ha.

Perdagangan Kelapa Sawit

Total volume perdagangan kelapa sawit yang berasal dari Kabupaten Pulang Pisau yang tercatat di tahun 2020 sebesar 285.876 ton. Volume perdagangan ini kurang dari 1% dari total volume perdagangan kelapa sawit nasional. Sebagian besar (85%) produk kelapa sawit dijual di pasar domestik dan sisanya diekspor ke 126 negara, diantaranya adalah Cina, India, Malaysia, Pakistan, serta negara-

negara Asia lainnya. Total nilai perdagangan kelapa sawit di Kabupaten Pulang Pisau mencapai US\$44 juta dolar di tahun 2020.

Rantai Nilai dan Ketertelusuran Rantai Suplai

Di tahun 2019, sekitar 96% produksi minyak kelapa sawit dari Pulang Pisau berasal dari perkebunan besar dan sisanya (4%) berasal dari perkebunan rakyat. *Fresh fruit bunch* (FFB) dari perkebunan disuplai ke pabrik kelapa sawit (PKS) dan diproses menjadi CPO. Sebagian besar produksi kelapa sawit dari Pulang Pisau diperdagangkan dalam bentuk CPO (87% dari volume produksi) dengan 85%-nya diperdagangkan untuk pasar domestik. Sekitar 15% volume produksi CPO diolah di *refinery* domestik menjadi RPO (*refined palm oil*) untuk pasar ekspor. Dari aspek ketertelusuran, hanya 1% produksi minyak sawit di Pulang Pisau yang dapat diidentifikasi afiliasinya dengan rantai perdagangan grup korporasi tertentu. Dari 95 studi kasus rantai dagang di tahun 2020, hanya 4% yang dapat ditelusuri.

Risiko dan Tantangan untuk Mencapai Kelapa Sawit Berkelanjutan

Hasil kajian terhadap risiko hipotetis menunjukkan Kabupaten Pulang Pisau termasuk dalam kabupaten dengan skor risiko tinggi (0,76 dari 1,00). Ditinjau berdasarkan indikatornya, risiko terbesar Kabupaten Pulang Pisau berasal dari *mill* yang tidak tersertifikasi berkelanjutan dan risiko dari stagnasi pendekatan yurisdiksi di sektor sawit berkelanjutan. Selain mengkaji risiko hipotetis, diskusi bersama para pemangku kepentingan mengidentifikasi beberapa permasalahan utama kelapa sawit berkelanjutan yang dikelompokkan dalam isu legalitas, produktivitas, sosial, dan lingkungan.

Aktor dan Jaringan Sosial Kelapa Sawit

Terdapat 119 aktor yang membentuk 209 jaringan di sektor kelapa sawit. Para aktor di tingkat Kabupaten Pulang Pisau memiliki keterkaitan dengan para aktor di Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional. Beberapa aktor penting yang teridentifikasi adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, GAPKI

(Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Kalimantan Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, perusahaan kelapa sawit, BDPKKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), masyarakat, pekebun swadaya, dan mitra pembangunan (LSM-Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO-*non-governmental organization*) (urutan tidak berdasarkan peringkat). Di samping analisis aktor dan jaringan sosial ini, para pemangku kepentingan dan kewenangannya diidentifikasi lebih lanjut dalam konteks kerangka logis teori perubahan.

Peranan Gender

Komitmen pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pengarusutamaan gender telah tertuang dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2020. Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Pulang Pisau dilakukan untuk percepatan perwujudan kesetaraan gender sesuai kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum PUG di Daerah. Penduduk Pulang Pisau berasal dari berbagai etnis dengan mayoritas Suku Dayak, Banjar, dan Jawa. Dominasi patriarki memang dibentuk oleh nilai-nilai budaya dan pengalaman masa lalu yang kemudian tersosialisasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Di sektor kelapa sawit, para pekerja perempuan memiliki peranan penting dalam proses produksi, terutama karena perempuan relatif lebih teliti dan hati-hati dalam bekerja. Keterlibatan perempuan sangat penting pada proses pembersihan lahan, pembibitan, penyemaian, penyemprotan, perawatan, dan pengumpulan brondolan. Perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit rerata memiliki beban kerja ganda, di sektor perkebunan dan juga domestik.

Dukungan Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pendekatan yurisdiksi di Kabupaten Pulang Pisau ditunjukkan melalui strategi pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth strategy*/GGs) untuk pengembangan lahan, termasuk di dalamnya pengembangan kelapa sawit. Strategi ini mengidentifikasi intervensi terkait dengan pembangunan hijau dengan fokus di empat sektor utama, dan sektor perkebunan merupakan salah satunya. GGS juga terintegrasi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RAD GRK (Rencana Aksi

Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) Provinsi Kalimantan Tengah dan Strada REDD+ (Strategi Daerah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*+). Kelapa sawit merupakan komoditas baru di Kabupaten Pulang Pisau dan ada program penanaman kembali kelapa sawit untuk petani rakyat. Kabupaten Pulang Pisau juga telah memiliki forum multipihak, yakni Forum Hapakat Lestari.

Memperkuat Visi Kelapa Sawit Berkelanjutan dan RAD KSB Melalui Teori Perubahan, Teori Tindakan, serta Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi (TTM)

Teori perubahan (*theory of change*/ToC), teori tindakan (*theory of action*/ToA), serta kerangka kerja pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation framework*/MEF), yang selanjutnya disebut sebagai TTM (ToC, ToA, dan MEF); adalah suatu alat untuk menjaring visi bersama secara partisipatif. Para pihak di Kabupaten Pulang Pisau memiliki visi bersama untuk **mewujudkan pengurangan deforestasi, peningkatan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2030**. Melalui lokakarya TTM, para pihak merumuskan indikator untuk mengukur ketercapaian visi ini adalah penurunan deforestasi hingga 50%, pelestarian hutan lindung (240.377 ha) dan gambut (4.675.105 ha), serta kawasan suaka alam dan alam (216.595 ha). Berdasarkan hasil penelitian, tim peneliti merekomendasikan **indikator yang lebih progresif, yakni dengan menyasar perlindungan hutan dan nol deforestasi terhadap 356.228 ha dan penurunan deforestasi sebesar 80% di APL (areal penggunaan lain) yang diimbangi dengan peningkatan intensifikasi sebesar 20% untuk meningkatkan pendapatan pekebun sebesar 20%**. Tujuan atau dampak ini di Kabupaten Pulang Pisau akan dicapai melalui tiga jalur perubahan (*change pathways*), yakni: data, kepatuhan hukum dan tata kelola; pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha yang berkelanjutan. Jalur-jalur perubahan yang telah dikembangkan juga berpeluang mendorong transformasi gender.

Pemodelan Dampak Kebijakan Sawit Berkelanjutan melalui JAPOS

JAPOS (*Jurisdictional Approach of Palm Oil Simulation*) adalah alat untuk memodelkan dampak skenario kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. JAPOS dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memahami sinergi dan timbal balik antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. JAPOS memodelkan intervensi kebijakan yang dijabarkan dalam RAD PKS. Model ini memproyeksikan masa depan sebagai dampak dari implementasi intervensi untuk mencapai kelapa sawit berkelanjutan. Pada studi ini kami mengembangkan tiga skenario yakni BAU (*business as usual*), skenario NDP (*no deforestation and no peat*), dan skenario kombinasi NDP dengan intensifikasi, sertifikasi dan insentif (harga premium, pajak karbon dan transfer fiskal berbasis ekologis). Hasil simulasi JAPOS menunjukkan bahwa skenario NDP dan kombinasi NDP dengan intensifikasi, sertifikasi, dan insentif dapat menurunkan deforestasi kumulatif sebesar 100% dari BAU dan emisi gas rumah kaca sebesar 85-86% dari BAU. Namun, terdapat penurunan CPKO (*crude palm kernel oil*), perluasan area perkebunan, dan nilai perdagangan.

Rekomendasi kunci untuk RAD PKS Kabupaten Pulang Pisau

Rekomendasi kunci hasil rumusan TTM dan JAPOS menghasilkan visi bersama dan poin-poin rekomendasi kunci yang dijabarkan dalam matriks yang terdiri dari lima komponen, yakni: komponen penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; komponen peningkatan kapasitas petani dan percepatan peremajaan; komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

komponen tata kelola dan penanganan sengketa; dan komponen pelaksanaan sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan akses pasar produk-produk sawit.

Visi bersama Kabupaten Pulang Pisau adalah **mewujudkan pengurangan deforestasi, peningkatan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketahanan mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2030**. Melalui lokakarya TTM, para pihak merumuskan indikator untuk mengukur ketercapaian visi ini yaitu penurunan deforestasi hingga 50%, pelestarian hutan lindung (240.377 ha) dan gambut (4.675.105 ha), serta area suaka alam dan alam (216.595 ha). Berdasarkan hasil penelitian, tim peneliti merekomendasikan **indikator yang lebih progresif, yakni dengan menyoar perlindungan hutan dan nol deforestasi pada 356.228 ha dan penurunan deforestasi sebesar 80% di APL (areal penggunaan lain) yang diimbangi dengan peningkatan intensifikasi sebesar 20% untuk meningkatkan pendapatan pekebun rakyat sebesar 20%**.

Simulasi JAPOS menunjukkan bahwa skenario kebijakan NDP yang dikombinasikan dengan skenario intensifikasi, sertifikasi, dan berbagai skema insentif maupun disinsentif mampu menurunkan deforestasi kumulatif sebesar 29,3 ribu ha (100% dari BAU) dan emisi tahunan sebesar 5,2 juta ton CO₂ (86% dari BAU). Meskipun implementasi skenario ini akan berdampak pada penurunan produksi CPKO dan nilai perdagangan kelapa sawit, hal ini dapat diatasi melalui peningkatan intensifikasi dan insentif di masing-masing skenario kebijakan sehingga terjadi keseimbangan antara faktor ekonomi dan lingkungan untuk mewujudkan sektor kelapa sawit berkelanjutan.